



Buletin

Parlementaria



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

IKN 50 MW



- 4 Interkoneksi : GIS-4 Sepaku 150 KV
- 5 Target COD : Mei 2024
- 6 Skema/ Sumber Dana : IPP/ Full Equity
- 7 Tarif : ABDF



Revisi UU IKN, DPR Tinjau Langsung dan Gali Informasi

Nomor 1260/III/VIII/2023 - Agustus 2023



5 DPR Berkomitmen
Wakil
Kepentingan
Rakyat dan
Bersinergi dengan
Pemerintah



17 Legislator
Dukung
RUU PPRT
Segera
Disahkan



9 772614 339005

Revisi UU IKN, DPR Tinjau Langsung dan Gali Informasi



Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (22/08/23).

S ehari setelah menerima draf Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN, Komisi II DPR RI langsung mengunjungi lokasi IKN di Kalimantan Timur. Selain melihat perkembangan pembangunan di Nusantara, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi bekal untuk merevisi UU IKN.

"Kami (Komisi II DPR RI) menyampaikan pada Pemerintah, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan rancangan undang-undang itu, kami ingin melihat secara langsung progres pembangunan di IKN ini," ungkap Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8).

Pun rombongan Komisi II mendapat penjelasan terkait progres pembangunan IKN dari pihak Otorita IKN. Setelah mengunjungi beberapa titik lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPPP), seperti Titik Nol Nusantara, Menara Pandang Sumbu Kebangsaan Barat, Hunian Pekerja Konstruksi, Istana Negara, Rumah Tapak Menteri, dan Bendungan Sepaku Semoi, Doli mengaku terkejut dengan progres pembangunan yang ada.

"Kita juga sebetulnya terkesima, karena saya terakhir ke sini kurang lebih tahun lalu itu belum ada apa-apa sama sekali. Jadi kita terkesima juga melihat kurang dari setahun progresnya begitu cepat sampai hampir 40 persen progres pembangunan, jadi sudah kelihatan bentuknya lah. Kalau sampai akhir tahun 70 persen, kita yakin tanggal

17 Agustus 2024 bisa dilakukan upacara bendera di IKN," imbuh Politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut pemantauan Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra tahap pertama pembangunan IKN tersebut telah berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut dia pun menjangkir aspirasi masyarakat setempat. "Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat sangat positif. Semenjak adanya pembangunan IKN pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai terlihat, dari semula rumah kayu sekarang sudah banyak adanya renovasi-renovasi rumah penduduk dan geliat ekonomi masyarakat sangat terlihat," papar Bagus.

Pembangunan IKN memberikan dampak positif bagi kegiatan perekonomian di kawasan. "Masyarakat yang tadinya susah lapangan pekerjaan kini sudah banyak yang mempunyai penghasilan sebagai pekerja di IKN termasuk jasa-jasa penyewaan kendaraan. Kehadiran pembangunan IKN sangat berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat," ungkap Gus Adhi sapaan akrabnya.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk mewujudkan perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 di IKN. "Kami selalu berusaha sebaik mungkin agar dapat menjalankan amanah untuk mewujudkan IKN dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

uf.ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kolaborasi Pemerintah-Industri Diperlukan untuk Berdayakan Korban PHK

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nasib korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tak kunjung mendapat pekerjaan baru. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah dengan pelaku industri untuk membantu mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

"Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pekerja yang terkena PHK,

seperti pelatihan keterampilan dan bantuan mencari kerja. Perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja dengan membuka investasi dan mengembangkan teknologi baru," kata Puan, Rabu (23/8).

Puan pun mendukung upaya Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang melakukan pendekatan kepada para pengusaha di Indonesia untuk turut memperhatikan para pekerja yang terkena PHK. Terutama perusahaan-perusahaan yang tengah bertumbuh secara positif.

"Komitmen Negara untuk menjamin hak warganya mendapat pekerjaan dan penghidupan layak harus didukung dari peran para pelaku industri. Pendekatan yang baik ini kami harapkan dapat menghasilkan kolaborasi untuk mengurangi pengangguran di Tanah Air," jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini lantaran perusahaan yang tumbuh sehat akan memerlukan produksi lebih banyak barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

aha



Ketua DPR RI
Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: IKA/PDT



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemerintahan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K. PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh
Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom,
Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske
Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum
Alaydrus, Bunga Leonaricha Firda Dysie, Balegys Maeshyntha, Anju
Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budlati, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdillah, Geraldidi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suzani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Aparat Diminta Ringkus Penjual Senjata Ilegal di Lokapasar



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memberikan keterangan usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa, (22/8/2023).

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus minta aparat penegak hukum (APH) bertindak cepat dan tegas ringkus oknum penjual senjata ilegal di lokapasar (*marketplace*). Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan potensi kriminal dan yang lebih membahayakan lagi jika sampai dibawa ke Papua.

"Itu sudah pasti melanggar, pasti itu arahnya ke kriminal. Namanya senjata api ilegal digunakan untuk kriminal atau lebih parah lagi kalau mereka bawa ke Papua. Yang kena kan anak bangsa sendiri gitu loh.

”

KITA SUDAH LIHAT KAN DI AMERIKA SEPERTI APA, SEBENTAR-BENTAR ADA PENEMBAKAN. NAH KALAU INI MASUK ATAU DITERIMA OLEH ORANG-ORANG (TIDAK BERTANGGUNG JAWAB) ITU YA, JADI BUKAN SEMATA-MATA KRIMINAL LAGI.

Saya pikir ini harus ditindak tegas," tegas ujarinya pada **Parlementaria** di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan ada undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata. Sehingga, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk membeli atau menjual senjata ilegal tersebut. "Bayangin orang masalahnya dari katakan senapan angin, itu kan soal mudah kalau dia mau bertransformasi menjadi senjata api," sambungnya.

Lodewijk mengatakan akan sangat berbahaya apabila senjata api beredar luas di masyarakat. "Kita sudah lihat kan di Amerika seperti apa, sebentar-bentar ada penembakan. Nah kalau ini masuk atau diterima oleh orang-orang (tidak bertanggung jawab) itu ya, jadi bukan semata-mata kriminal lagi. Artinya mungkin awalnya masalah ekonomi, ini kan sudah masalah psikologis. Anak sekolah ditembak dan lain sebagainya. Itu kan tidak bagus ya," tutupnya.

Diketahui, kasus senjata api (senpi) ilegal marak dipasarkan di beberapa *marketplace* dengan harga tinggi yang mencapai ratusan juta rupiah. Dalam memasarkan senpi ilegal tersebut, tersangka DE, seorang Karyawan BUMN di PT KAI, menggunakan identitas palsu TNI AD, sehingga banyak pembeli yang tertipu.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan dari hasil pendalaman yang dilakukan, DE melakukan kamuflase melalui toko daring tersebut dengan menjual *diecast* dan mainan militer. [we,far,arn/rdn](https://www.far.arn.rdn)



DPR Berkomitmen Wakili Kepentingan Rakyat dan Bersinergi dengan Pemerintah



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (dua dari kiri) dalam foto bersama sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, DPR RI sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, dengan integritas dan ketulusan, DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.

"DPR RI berkomitmen untuk terus melangkah maju, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat demokrasi,

dan menjaga keutuhan NKRI," ujar Dasco dalam video yang diterima **Parlementaria**, Kamis (17/8).

Diketahui, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan dari sisi legislasi, DPR RI Periode 2019-2024 telah berhasil mengeluarkan sebanyak 64 undang-undang (UU). Puan juga memastikan akan menuntaskan setiap pembahasan RUU secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.

Adapun produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama

Pemerintah adalah Komisi I DPR sebanyak 6 Undang-Undang (UU), Komisi II DPR sebanyak 26 UU, Komisi III DPR sebanyak 6 UU, Komisi V DPR sebanyak 1 UU, Komisi VI DPR mengeluarkan 5 UU dan Komisi VII DPR menghasilkan 1 Undang-undang, sedangkan Komisi IX DPR mengeluarkan 1 UU, Komisi X DPR menghasilkan 2 UU, serta Komisi XI DPR menghasilkan 5 Undang-Undang.

Sementara itu Badan Legislasi (Baleg) DPR menghasilkan 7 Undang-Undang, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus (Pansus) DPR menghasilkan 3 UU. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Susun Buku Laporan Kinerja Dewan, Gus Imin Harap Mudah Dimengerti dan Diakses



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar.

DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menyusun Buku Laporan Kinerja Dewan untuk masa bakti 2022-2023. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar berharap buku kinerja tersebut dapat dengan mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat luas.

"Jadi kita sedang menyiapkan laporan kinerja DPR Tahun 2022-2023 di mana setiap komisi akan diketahui produk dan kegiatannya. Pengabdian dan seluruh manfaatnya dari gedung DPR ini untuk rakyat. Kita harapkan buku kinerja ini akan mudah diakses dengan berbagai *platform* yang

”

YANG PALING PENTING DPR INI MESTINYA RESPONSIF, AKOMODATIF SEKALIGUS ASPIRATIF.

rakyat, masyarakat, kaum muda, profesi semua bisa mengerti," ujar Muhaimin usai menghadiri rapat terkait penyusunan buku tersebut, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Senin (21/8).

Dengan tersampainya data dan fakta kinerja DPR kepada masyarakat melalui buku laporan tersebut, ke depannya pria yang

kerap disapa Gus Imin ini berharap ada masukan-masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja DPR. Menutup pernyataannya, legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan bahwa penting bagi DPR untuk menjadi lembaga yang responsif, akomodatif dan aspiratif dengan terus memprioritaskan kebutuhan dasar.

"Yang paling penting DPR ini mestinya responsif, akomodatif sekaligus aspiratif. DPR harus terus memprioritaskan kebutuhan dasar. Semua kebutuhan dasar terpenuhi aturan hukum aturan perundang-undangan yang mendasar harus sudah lengkap," tutupnya.

 uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kerja Sama RI-Jepang Perkuat Sektor Ekonomi dan Pembangunan SDM

Wakil ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima kunjungan delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Natsuo Yamaguchi. Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama kedua negara di dalam sektor perekonomian, infrastruktur, dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk juga dalam pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta Fase 2.

"Ya kita tetap harus dorong itu, kita akan tetap dorong MRT Fase 2 karena kita lihat aktivasi yang pertama itu kan dia punya kesuksesan dan keberhasilan akurasi dari pada ketepatan waktunya itu kan sangat tinggi, jadi ini perlu kita dorong," ujar Rachmat Gobel usai pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (18/8).

”

KITA AKAN TETAP DORONG MRT FASE 2 KARENA KITA LIHAT AKTIVASI YANG PERTAMA ITU KAN DIA PUNYA KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN AKURASI DARI PADA KETEPATAN WAKTUNYA ITU KAN SANGAT TINGGI



FOTO: DPR/PTD

Wakil ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mendorong penguatan kerja sama dengan Jepang di bidang manufaktur dan pemberian kesempatan kerja pada bangsa Indonesia.

"Saya juga menceritakan bagaimana banyak sukses-sukses dilakukan dalam kerjasama Indonesia maupun investasi Jepang dalam pembangunan SDM. Terjadi adanya alih pekerjaan, ada alih pengetahuan, dan ada alih teknologi. Dan tidak sedikit orang Indonesia yang sudah menjadi CEO-CEO di perusahaan-perusahaan Jepang. Dan inilah kita berharap

berinvestasi di Jepang perlu kita dorong karena ada pembangunan SDM-nya yang sangat kita perlukan, jadi investasi bukan sekedar investasi tapi membangun SDM-nya," ujarnya.

Dalam pertemuan yang sama, Pimpinan Delegasi Parlemen Jepang Natsuo Yamaguchi mengungkapkan dengan adanya kerjasama khusus di bidang investor dan pembinaan SDM bisa mewujudkan sirkulasi antara kedua negara yang diharapkan. Ia pun berharap hubungan kedua negara dapat terus dilanjutkan dan berjalan dengan baik.

➡ [arn, far, we/aha](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



F-PDIP Sampaikan 6 Poin Demi Dukung Ekonomi Indonesia Inklusif dan Berkelanjutan

Mewakili Fraksi PDI-Perjuangan, Anggota DPR RI Sihar Sitorus menyatakan sepakat untuk membahas lebih lanjut RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme di DPR yang berlaku. Walaupun begitu, dirinya menyampaikan 6 (enam) poin guna menjadi catatan agar anggaran negara pada tahun mendatang bisa dibelanjakan secara mangkus dan sangkil.

Catatan tersebut disampaikan untuk menanggapi RUU APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2023) lalu. Ia menekankan APBN 2024 yang bertema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' itu perlu dikelola dengan memperhatikan potensi beban keuangan dan risiko fiskal yang dihadapi negara.

"APBN dalam fungsi alokasi harus memenuhi kebutuhan dasar, memberi pelayanan, dan pemerataan pembangunan, membangun kekuatan ekonomi nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Sihar saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senayan, Selasa (22/8).

Adapun berikut 6 (enam) poin yang disampaikan oleh Sihar. Pertama, Pemerintah Indonesia harus menuntaskan masalah di berbagai sektor krusial agar tidak menghambat

urusan rakyat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, kelistrikan; Kedua, Pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan fundamental demi meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Ketiga, asumsi ekonomi makro yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia harus menopang konsumsi rumah tangga, mendorong pertumbuhan ekonomi pendapatan negara, melakukan intervensi kebijakan untuk sektor ekonomi kerakyatan, dan menjaga tingkat inflasi tetap rendah serta stabil dengan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus memperkuat kebijakan arah

Fiskal Tahun 2024 melalui peningkatan rasio pajak, insentif perpajakan, peningkatan PNBPN serta komitmen belanja negara yang berkualitas dan optimal dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal sekaligus harmonisasi fiskal pusat dan daerah; Kelima, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program K/L terkait.

Keenam, Pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan anggaran berbasis kesejahteraan agar rakyat Indonesia bisa merasakan langsung dampaknya. "Oleh karena itu, pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah yang membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju, dan tentram," pungkas Sihar. **— ssb/aha**



FOTO: RSE/PDT

Anggota DPR RI Sihar Sitorus saat menyerahkan pandangan Fraksi PDI-Perjuangan atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).



F-PG Nilai RAPBN 2024 Cukup Komprehensif dalam Menjawab Tantangan yang Ada

Politisi Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar atas RAPBN 2024.

Fraksi Partai Golkar, tambahnya, mengatakan jelang Pemilu 2024, APBN 2024 dituntut untuk lebih akomodatif dengan menyediakan bantalan-bantalan fiskal yang memadai guna menjamin terciptanya situasi yang kondusif. Sehingga, pesta demokrasi dan agenda-agenda pembangunan dapat berjalan beriringan dengan lancar dan sukses.

Dari sisi eksternal, APBN 2024 masih dibayangi ketidakpastian dan gejolak perekonomian global yang kemudian menuntut APBN 2024 agar lebih cermat serta antisipatif dalam menentukan berbagai asumsi sebagai dasar penentuan politik anggaran. Melihat faktor internal dan eksternal tersebut, Fraksi P-Golkar menilai RAPBN 2024 sudah cukup komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada.

"Transformasi ekonomi bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam semalam, melainkan memerlukan estafet yang berkesinambungan lintas pemerintahan. Oleh karenanya, percepatan transformasi tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan pemerintah selanjutnya dalam melanjutkan dan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diinisiasi sebelumnya," jelas Agung dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Secara lebih rinci, Agung

melanjutkan, Fraksi P-Golkar mengapresiasi peningkatan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam RAPBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun atau meningkat 12,4 persen dari tahun 2023. Anggaran tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada 2024.

"Terkait proyek-proyek strategis nasional, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo karena hingga semester I 2023 ini, progres penyelesaiannya telah mencapai 70 persen dari target. Dalam delapan tahun atau satu windu terakhir, telah terselesaikan 158 proyek PSN," lanjutnya.

Dari sisi indikator ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada level 5,2

persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai sangat realistis untuk dicapai. Fraksi P-Golkar pun mengapresiasi langkah pemerintah yang menargetkan laju inflasi pada level 2,8 persen. Dari sisi defisit dan pembiayaan yang diusulkan sebesar Rp522,8 triliun, Fraksi P-Golkar menyambut baik tren terus menurunnya defisit anggaran sejak berakhirnya krisis Pandemi Covid-19. [bia/rdn](#)



FOTO: JKA/PDT

Anggota DPR RI Agung Widyantoro saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Desain Kebijakan APBN 2024, F-Partai Gerindra: Target Pertumbuhan Ekonomi Realistis

Fraksi Partai Gerindra DPR RI melalui Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan pihaknya mendukung desain kebijakan APBN tahun 2024 yang difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

"Kami juga mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. tema tersebut relevan dengan semangat kita bersama untuk lebih cepat mewujudkan pertumbuhan yang tinggi, pemerataan, serta ramah lingkungan," kata Wihadi dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, (22/8).

Lebih lanjut, mengenai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2%. Fraksi Partai Gerindra menilai asumsi ini lebih rendah dari usulan awal pemerintah pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM

PPKF) R-APBN 2024, sebesar 5,3% hingga 5,7%. target tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi 2023 dan realisasi tahun 2022 yang sebesar 5,3%. Namun demikian Fraksi Partai Gerindra menilai hal ini masih cukup realistis dan bisa dimaklumi.

"Mengacu pada capaian pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, perekonomian Indonesia telah pulih lebih cepat sejak 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,7%, lalu pada 2022 tumbuh 5,31% dan pada kuartal I-2023 tumbuh 5,03% (yoy). Kami memandang target pertumbuhan ekonomi 5,2% yang

ditetapkan pemerintah merupakan target yang realistis. Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari rentang 5,3% hingga 5,7% menjadi 5,2% bisa dimaklumi mengingat kondisi yang dihadapi saat ini, yang masih penuh ketidakpastian serta dinamika ekonomi global," paparnya.

Diketahui, beberapa lembaga internasional seperti ADB, Bank Dunia serta IMF dalam outlook ekonomi 2023 dan 2024, juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sebesar 4,8% (ADB), 4,9% (Bank Dunia), dan 5% (IMF). ➡ **we/aha**

”

**KAMI JUGA MENDUKUNG
TEMA KEBIJAKAN
FISKAL TAHUN 2024
YAITU MEMPERCEPAT
TRANSFORMASI
EKONOMI YANG
INKLUSIF DAN
BEKELANJUTAN.**

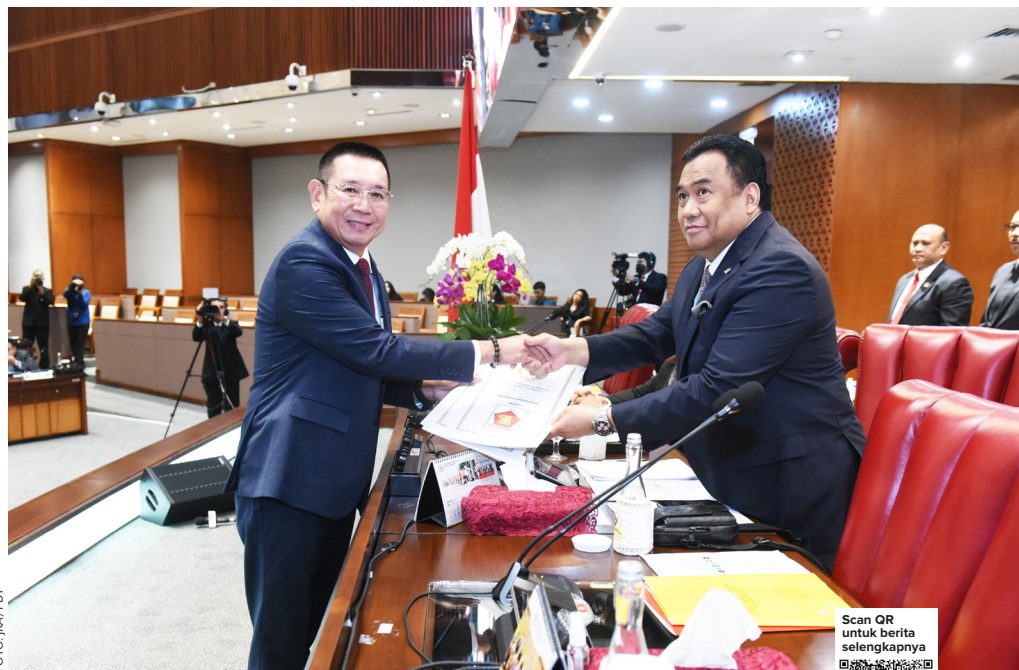


FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto saat menyerahkan pandangan Fraksi Partai Gerindra atas RAPBN 2024 kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



F-Partai NasDem Pandang Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Masih Tinggi

Fraksi Partai NasDem memandang angka target pertumbuhan Indonesia tahun 2024 yang sebesar 5,2% masih cukup tinggi.

Hal ini disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi NasDem atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang dibacakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro.

"Fraksi Partai NasDem memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dianggap masih cukup tinggi. Jika mengacu pada laporan IMF *"World Economic Outlook"* edisi Juli 2023 Indonesia diproyeksikan hanya tumbuh 5% yang diakibatkan Mitra dagang Utama Indonesia seperti Amerika Serikat Cina dan kawasan Eropa diproyeksikan akan mengalami perlambatan ekonomi, ujar Fauzi dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).

Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran DPR RI itu mengatakan adanya kekhawatiran atas kondisi tersebut yang menyebabkan ekspor dan investasi Indonesia akan tertekan. Hal ini akan menuntun pertumbuhan nasional bergantung pada sisi konsumsi dan belanja pemerintah. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem memandang bahwa diperlukan usaha yang lebih serius dari pemerintah untuk mencari alternatif baru pasar ekspor Indonesia.

Masih dalam catatan terkait indikator ekonomi makro, Fraksi Partai NasDem juga menyoroti tren penurunan kontribusi sektor industri

pengolahan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia turun ke angka 18,205% pada Kuartal 2 tahun 2023.

"Adapun penurunan nilai penurunan mulai tercatat sejak 2002 yang merupakan rekor tertinggi sebesar 31,95%. Pemerintah diharapkan memberikan insentif fiskal maupun peningkatan anggaran penelitian untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga terjadi peningkatan signifikan atas kontribusi sektor industri pengolahan dapat meningkat sampai 20% dari PDB," ucap Fauzi.

Produktivitas sektor pertanian juga tak luput menjadi perhatian. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih terkait

produktivitas sektor pertanian terutama dalam mengantisipasi dampak negatif dari fenomena El Nino. Fenomena ini dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan pangan nasional, terlebih jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan sektor pertanian hanya mencapai 2,2% pada Kuartal II tahun 2022 dan belum mampu lampau level pertumbuhan pra pandemi.

Terkait dengan inflasi, nilai tukar rupiah dan penetapan asumsi harga minyak, Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa target-target yang telah ditetapkan cukup realistis. Meski begitu masih perlu banyak upaya untuk menghadapi kondisi global dan berbagai tantangan di masing-masing sektor. **uc/aha**



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro saat menyerahkan pandangan Fraksi Partai Nasdem atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Patok Pertumbuhan Ekonomi di Angka 5,3 Persen, Fraksi PKB Usulkan Peningkatan Kualitas SDM

Berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 tentang RUU

APBN tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang di dalamnya memuat rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di tahun 2024. Fraksi PKB DPR RI memberikan pandangannya. FPKB mengusulkan agar peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fokus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari yang membacakan pandangan fraksi menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,2 persen. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari estimasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,0 persen.

"Namun jika dibandingkan dengan range awal target pertumbuhan tahun 2024 yang berada kisaran 5,1-5,7 persen, FPKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa di patok di angka 5,3 persen," papar Ratna di ruang rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Menurut FPKB salah satu kunci menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Bahkan dimasa periode ke dua pemerintahan Jokowi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi target utama pembangunan nasional.

Sehingga guna mewujudkan agenda tersebut, terlebih di akhir masa jabatan presiden, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan dioptimalkan baik melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan padat karya.

Berkaitan dengan inflasi yang dipatok sebesar 2,8 persen. FPKB

menilai target tersebut *over confident*. FPKB sendiri mematok inflasi 2023 sebesar 3,0 persen. Meskipun terjadi moderasi harga komoditas dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor perlambatan inflasi secara global tahun 2023, namun inflasi negara-negara maju khususnya di Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah dan panjangnya.

"Pemerintah dan otoritas moneter harus mampu menjamin stabilitas politik dan menjaga iklim investasi yang kondusif guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia," untkap Ratna.

— **ssb/aha**



FOTO:ENO/PDT

Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari saat menyerahkan pandangan Fraksi PKB atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).



Fraksi Partai Demokrat: Anggaran IKN Rp40 Triliun Jangan Hanya Kejar Target Seremonial

Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dalam Rancangan APBN 2024. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBN 2024 serta Nota Keuangan.

Dalam pandangan Fraksi yang disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, ia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.

"Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan," kata Suhardi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Dia mengatakan pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan, kata dia, harus diutamakan.

Menurut Suhardi, jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian. "Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan," kata dia.

Lebih lanjut, Suhardi menyambut

baik atas diakomodasinya usulan-usulan FPD dalam RAPBN 2024, salah satunya adalah untuk menaikkan gaji ASN/TNI/Polri. Namun, ia sangat berharap kebijakan murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN/TNI/Polri, bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis karena memasuki tahun politik.

Selain itu, Suhardi juga menyinggung program food estate, ia menilai program tersebut perlu dikaji kembali efektivitasnya dan dampaknya terhadap keseimbangan alam. "Anggaran untuk kedaulatan pangan perlu angka yang besar, sehingga perlu dilihat dari kaca mata ekonomi hijau, jangan sampai bertolak belakang dengan cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" atau disebut SDGs," terangnya.

Selanjutnya, untuk mengejar ketahanan pangan, Pemerintah

perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian, seperti irigasi, tata kelola pupuk, mata rantai penjualan produk pertanian serta infrastruktur jalan yang menghubungkan perdesaan dengan jalan-jalan utama, termasuk jalan tol.

"Di tengah ancaman krisis pangan, Pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperkuat industri pasok pangan, sehingga diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk perluasan komoditas pangan unggulan, seperti beras, gula, garam dan lainnya. Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk distribusi monitoring rantai minyak mentah yang beredar di pasar," ungkapnya.

— ann/aha



Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: IKA/PDI

F-PKS: RAPBN tahun 2024 Butuhkan Penajaman agar Lebih Sehat, Kredibel dan Pro-Rakyat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memandang pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus kemarin masih menunjukkan belum ada yang istimewa dari target pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya. RAPBN tahun 2024 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Untuk menunaikan target pemerintah dalam RAPBN 2024, Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR RI Diah Nurwitasari menyampaikan beberapa catatan melalui pandangan umum Fraksi PKS terhadap keterangan pemerintah atas Rancangan

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).


Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN 2024 merupakan tahapan akhir dari pemenuhan berbagai target RPJMN 2019-2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi kita belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 202 sebesar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi kita dalam satu dekade stagnan dibawa 5 persen dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2 persen.

"Angka ini jauh dari optimisme Presiden di awal jabatan yaitu 7 persen, bahkan belum pernah menyentuh

target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2 persen. dengan tingkat pertumbuhan tersebut rasanya semakin sulit untuk mencapai target menjadi negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi pada Indonesia emas 2045," katanya.

Kemudian, pihaknya mencermati ketimpangan ekonomi rakyat Indonesia masih sangat lebar. kue pembangunan dan kekayaan nasional dinikmati secara tidak merata. Dalam catatan Bank Dunia ketimpangan di Indonesia menjadi nomor 3 terburuk di dunia.

Fraksi PKS juga berpandangan Indeks Persepsi Korupsi terus mengalami tren pembusukan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. IPK Indonesia posisi 110 dari 180 negara. Hal ini masih menunjukkan tingginya *moral hazard* dan kebocoran anggaran yang semestinya bisa direduksi sehingga dapat mempercepat kemajuan bangsa.

Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk bekerja dengan serius untuk menegakan reformasi perpajakan. "Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan sebanyak 94 butir yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan. Demikian, Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PKS agar dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya," tutupnya.  rnm/aha



Anggota DPR RI Diah Nurwitasari saat menyerahkan pandangan Fraksi PKS atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Fraksi PAN: Pemerintah Harus Manfaatkan Momentum Pesta Demokrasi dalam Penuhi Target Pertumbuhan EKonomi

Fraksi PAN DPR RI menyampaikan tanggapannya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024. Tanggapan fraksi itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PAN yakni, Eko Hendro Purnomo, yang menyebutkan pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum pemilu di tahun depan.

"Perhelatan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momentum kebangkitan konsumsi dan investasi yang lebih produktif. Seiring dengan terjaganya kondusifitas keamanan, sosial, politik, Fraksi PAN berharap agar Pemerintah dapat memanfaatkan pesta demokrasi ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan," ujarnya saat Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I, Selasa (22/8).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mematok pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen, dimana Fraksi PAN menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,2 persen bersifat moderat dan realistis. Untuk itu, fraksi ini turut mengingatkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Fraksi PAN juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak,

tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, memajukan UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," terang Eko.

Sementara itu berbicara soal inflasi sebesar 2,8 Persen, Fraksi PAN menilai inflasi yang ditargetkan pemerintah cukup realistis. Hal ini mengingat tren penurunan inflasi domestik yang saat ini terjadi karena keberhasilan Pemerintah dalam menjaga harga pangan tetap stabil hingga semester awal tahun ini. Namun demikian, Fraksi PAN mengingatkan kepada Pemerintah karena dunia sedang dihadapkan pada krisis iklim. Fenomena El Nino menjadi kekhawatiran yang saat ini sudah merugikan para petani di Indonesia.

Eko mencontohkan kondisi petani bawang merah di Kabupaten Pidie Aceh mengalami penurunan produksi, sawah di Kabupaten Indramayu tidak dapat ditanami padi oleh petani, hingga petani jagung di Gorontalo yang mengalami gagal panen. "Maka dari itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah," tukasnya.

Berkecenderungan begitu besarnya pengaruh Perubahan Iklim terhadap perekonomian hingga hajat hidup masyarakat Indonesia, maka Fraksi PAN mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang diusulkan oleh Fraksi PAN agar dapat segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR. **aha**



Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo saat menyerahkan pandangan Fraksi PAN atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Fraksi PPP Tekankan Penyusunan RAPBN 2024 Harus Pertimbangkan Fleksibilitas Ekonomi Global

Anggota DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, proyeksi ekonomi yang disusun dalam RAPBN 2024 harus realistis dan mempertimbangkan segala potensi risiko dan ketidakpastian. Menurutnya dalam menghadapi dunia yang terus berubah, fleksibilitas dalam rencana ekonomi sangatlah penting.

Awiek, begitu ia biasa disapa, menilai rentang pertumbuhan ekonomi yang disebutkan (5,3% hingga 5,7%) terlihat cukup optimistis, mengingat kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada pertumbuhan domestik. Ia menyampaikan penting untuk mempertimbangkan ketidakpastian eksternal seperti perubahan geopolitik, perubahan kebijakan global dan dampak pandemi yang masih berlanjut.

"Rentang inflasi yang cukup lebar (1,5% hingga 3,5%) mungkin mengindikasikan ketidakpastian dalam memproyeksi inflasi. Penting untuk memiliki proyeksi inflasi yang lebih akurat karena inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat," pungkas Awiek dalam pembacaan pandangan Fraksi PPP terhadap RAPBN 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/8).

Ia menambahkan, rentang nilai tukar rupiah terhadap USD yang diberikan Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD menunjukkan potensi

volabilitas nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar yang besar dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan perdagangan, oleh karena itu penting untuk memiliki strategi pengelolaan resiko yang efektif.

"Dalam RAPBN 2024 Presiden Jokowi mengumumkan rencana besar pada tahun depan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan bahwa infrakstuktur adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana sebesar Rp422,7 trilliun akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur di seluruh Indonesia," imbuhnya.

"Fraksi PPP menilai rencana ini akan menjadi langkah yang positif bagi Indonesia. Rencana ini akan meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia I, serta membentuk dasar yang kuat untuk masadepan," tukas Awiek.

—tn/aha



FOTO:JKA/PDT

Anggota DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi saat menyerahkan pandangan Fraksi PPP atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).



Legislator Dukung RUU PPRT Segera Disahkan

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Luluk

Nur Hamidah mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) agar segera disahkan. Menurutnya, pembahasan RUU PPRT sudah lama tidak berjalan, padahal saat ini banyak PRT yang

”

SAYA BERHARAP RUU PPRT INI MENJADI PRIORITAS PADA MASA SIDANG KALI INI, KITA JUGA SIAP APABILA INGIN DIBAHAS BERSAMA DENGAN PEMERINTAH.

mengalami kekerasan.

”Baru saja kita merayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 namun saat ini banyak PRT yang belum meraih kemerdekaannya. Sudah seharusnya RUU PPRT ini segera disahkan,” kata Luluk dalam interupsi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Dia menyebut tidak adanya UU yang melindungi hak PRT membuat para PRT tersebut diperlakukan semena-mena. PRT juga dianggap sebagai warga kelas 2 tidak diakui dalam bekerja dan tidak diakui hak-haknya.

Pihaknya menyampaikan, kasus kekerasan kepada PRT sama halnya dengan kasus *human trafficking* di luar negeri. Padahal di dalam negeri kasus tersebut hampir serupa.

”Saya berharap RUU PPRT ini menjadi prioritas pada masa sidang kali ini, kita juga siap apabila ingin dibahas bersama dengan pemerintah,” pungkasnya. — **tn/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah saat interupsi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2023).

Komisi I Pertimbangkan Perkuat Peran BSSN dalam Revisi UU ITE

Komisi I DPR RI menjaring masukan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkaya rekomendasi terkait perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu masukan yang disampaikan oleh BSSN adalah melibatkan BSSN dalam tahap penyidikan tindak pidana bidang Teknologi ITE.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari akan mempertimbangkan sekaligus membahas lebih lanjut pada pertemuan mendatang. "Kepala BSSN menyampaikan beberapa hal teknis yang sering terjadi dalam penanganan insiden siber. Sesungguhnya kami akan lihat dahulu (masukan tersebut pada agenda selanjutnya)," ucap Kharis kepada **Parlementaria** usai memimpin agenda tersebut, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mendukung keputusan Pimpinan Komisi I DPR untuk membahas lebih lanjut penguatan peran BSSN dalam tahap penyidikan kasus terkait Teknologi ITE. Dirinya menegaskan bahwa butuh ada sinkronisasi peraturan agar implementasinya tidak menimbulkan polemik.

"Kita sangat ingin peran BSSN masuk ke dalam (perubahan) undang-undang ini, tapi kita mesti

pastikan melalui sinkronisasi dengan aturan yang lainnya. Ini penting supaya tidak bertentangan. Jadi konsekuensi legal juga enggak memberatkan," ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Terakhir, ia menyampaikan Komisi I DPR akan membahas lebih lanjut rekomendasi BSSN dalam agenda rapat Komisi I DPR pada Senin (28/8/2023) mendatang. Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 43, pegawai yang terlibat dalam tahap penyidikan tindak pidana bidang

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian bidang komunikasi dan informatika.

Sebab itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta Komisi I DPR mempertimbangkan BSSN ikut ambil peran dalam penyidikan tindak pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu, BSSN menyampaikan rekomendasi tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. — ts/rdn

”
KITA SANGAT INGIN PERAN BSSN MASUK KE DALAM (PERUBAHAN) UNDANG-UNDANG INI, TAPI KITA MESTI PASTIKAN MELALUI SINKRONISASI DENGAN ATURAN YANG LAINNYA.



Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).



Presiden Jokowi Dinilai Lebih Terganggu dengan 'Polusi Budaya' daripada 'Polusi Udara'

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai ada yang hilang dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang dilakukan di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Yaitu, persoalan tidak disinggunginya sama sekali terkait persoalan polusi udara yang kondisinya sangat buruk dan tidak sehat saat ini. Sayangnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada polusi budaya di awal pidatonya.

Lanjutnya, seharusnya Presiden juga menyampaikan komitmen dan ketegasan kebijakan pemerintah untuk segera mengatasi persoalan polusi udara di beberapa kota besar yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga, jangan sampai benar terjadi adanya anggapan, bahwa Presiden lebih terganggu dengan polusi budaya daripada adanya polusi udara yang tidak sehat selama ini.

Padahal sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi menilai kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk dan tidak sehat. Beliau menyebut kualitas udara di DKI berada di angka 156 dengan keterangan 'Tidak Sehat'.

"Atas persoalan ini saya meminta Jokowi tidak hanya menyalahkan musim kemarau selama tiga bulan terakhir sebagai penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Sebab, pencemaran udara ini muncul akibat aktivitas manusia yang berpengaruh pada lingkungan seperti naiknya jumlah kendaraan, aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi dan lain-lain," urai Johan dalam keterangan

rilisnya yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (22/8).

Johan menilai persoalan polusi udara di Jakarta semakin memburuk akibat pemerintah lalai dan kurang serius melakukan regulasi kebijakan untuk melindungi lingkungan. Hal ini terbukti pada Oktober 2021 Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan peringkat kesembilan sebagai negara penghasil polusi terbesar dunia.

Legislator dapil wilayah NTB I itu meminta agar pemerintah tidak hanya memutuskan keputusan jangka pendek untuk mengatasi polusi udara seperti yang diungkap

Jokowi dengan cara rekayasa cuaca dan intervensi lainnya. Namun, harus ada kebijakan yang tegas terhadap tindak kejahatan pencemaran lingkungan serta menuntaskan berbagai persoalan lingkungan yang ada di Jabodetabek khususnya.

"Persoalan polusi udara ini tidak bisa diselesaikan dengan cara instan namun harus berkelanjutan dan memerlukan upaya masif dari segala pihak. Pemerintah harus menjadi pelopor untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kebersihan kualitas udara," tegas Politisi Fraksi PKS ini.

gal/rdn



Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

FOTO: AFR/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hermanto: Pembentukan BUK Migas Harus Dicermati Secara Hati-Hati

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Medco Energi Internasional & Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) dalam rangka Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Dalam kesempatan ini, Anggota Baleg DPR RI Hermanto menyampaikan agar wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas haruslah dicermati secara hati-hati.

”

NAH JADI BUMN INI LAH YANG HARUS KITA PERKUAT, DIA HARUS BEKERJA SECARA PROFESIONAL.

“Jangan misalnya nanti negara memberikan satu kewenangan yang bersifat khusus kepada institusi tertentu (BUK) yang nanti dia memiliki sebuah *agreement* tertentu yang dimana itu nanti yang akan kita khawatirkan, negara itu meminimalisir kewenangannya. BUK

memang harus kita cermati secara hati-hati, karena saya memandang bahwa BUMN itu harusnya dia bekerja secara profesional,” terangnya dalam RDPU di Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Alih-alih membentuk BUK Migas, Hermanto berharap untuk penguatan BUMN itu sendiri. Menurutnya, dengan BUMN yang kuat akan berbanding lurus dengan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat dan negara.

“Nah jadi BUMN ini lah yang harus kita perkuat, dia harus bekerja secara profesional. Termasuk juga sumber daya manusia di BUMN itu, termasuk juga mekanisme dan sistem yang ada di BUMN itu. Nah itu memiliki keberpihakan yang jelas, kepada negara, kepada rakyat, kalau misalnya kita serahkan ke BUK, kita tidak tahu ini kejelasannya, dan seperti apa keberpihakannya,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aset dalam bentuk sumber daya alam harus betul-betul harus dikuasai oleh negara dan negara yang mengendalikannya, negara yang mengaturnya dan juga negara yang mengawasinya. “Nah, negara juga harus memiliki prinsip kebijakan bagaimana aset sumber daya alam ini, itu betul-betul untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Diketahui, hingga saat ini pemerintah dan parlemen belum sepakat ihwal bentuk badan usaha khusus atau BUK migas sebagai lembaga definit pengatur operasi hulu migas dalam pembahasan RUU Migas. [we,laz/aha](https://www.welaz/aha)



FOTO: MUN/PPT

Anggota Baleg DPR RI Hermanto saat mengikuti RDPU dengan Dirut PT Medco Energi Internasional & Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) di Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).



Netty Soroti RAPBN 2024: Tentukan Skala Prioritas, Masih Banyak Target Harus Dikejar

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetyani mengingatkan pemerintah untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya lantaran masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM.

"Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,"

ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "Mengupas RAPBN 2024" yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).

Politisi PKS ini lantas dengan gamblang memberikan contoh pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Ia pun mengaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.

"Skala prioritas inilah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran yang besar. Tentu ini juga harus kita kaitkan dengan

angka kemiskinan, termasuk juga pengangguran. Pengangguran kita yang 60 persen yaitu diisi oleh warga yang berpendidikan rendah. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang sudah dimulai sejak pekan lalu," tuturnya.

Dalam pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2023 silam, tertuang bahwa realisasi arah kebijakan RAPBN 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Menurut Netty terwujudnya transformasi ekonomi, kebangkitan ekonomi dan ketahanan ekonomi bertumpu pada sumber daya manusia.

Menurutnya asalah lain di bidang kesehatan yang masih memerlukan perhatian antara lain penanganan malaria, penyakit kusta, kondisi *wasting* pada bayi dan balita dan beberapa masalah lain yang kerap ditemukan di lapangan. Ia pun menyoroti adanya temuan penggunaan anggaran stunting hingga disorot oleh berbagai media.

Penurunan prevalensi stunting sendiri sebenarnya telah masuk dalam fokus strategi jangka pendek untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato presiden 16 Agustus lalu. Sedangkan angka target Penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 masuk dalam RPJMN 2020-2024. [uc/rdn](https://www.ri.go.id/uc/rdn)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetyani dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "Mengupas RAPBN 2024" yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).

FOTO: MURI/PDT

BAKN: Perlu Ada Batasan Tentang Regulasi BI *Checking*

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menilai perlu ada batasan mengenai regulasi BI *Checking*. Lantaran, menurut Direktur Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dalam Penelaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Pernyataan Modal Negara (PMN) Kepada BUMN di Bandung, Selasa (18/8) menyatakan salah satu hambatan dalam penyaluran KPR saat ini adalah masyarakat terhalang oleh BI *Checking* terutama dengan maraknya pinjol saat ini.

BI *Checking* merupakan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis untuk mengecek riwayat kredit seseorang. Aturan ini merupakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan serta

Bank Indonesia dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga regulasi ini bersifat teknis bukan seperti undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR RI.

"Jadi tidak mungkin misalkan DPR mengeluarkan undang-undang terkait masalah aturan BI *checking* itu. Memang saya melihat BI *checking* itu sendiri kan petunjuk teknisnya ada di Otoritas Jasa Keuangan kementerian keuangan dan Bank Indonesia itu sendiri," ujar Wahyu kepada **Parlementaria**.

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap kedepannya ada batasan dalam regulasi BI *Checking* untuk memudahkan dan melindungi masyarakat. "Misalnya kalau pinjaman di atas 200 juta atau

mungkin di atas satu miliar baru itu membutuhkan BI *checking*. Jadi janganlah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, mau kredit rumah sehat yang 125, 150 BI *checking*, nanti mau dapat kredit kur BI *checking*, kredit UMKM BI *checking*. Itu sama saja kayak enggak niat kasih pinjaman," pungkasnya. **gal/aha**

”

JADI TIDAK MUNGKIN MISALKAN DPR MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT MASALAH ATURAN BI *CHECKING* ITU. MEMANG SAYA MELIHAT BI *CHECKING* ITU SENDIRI KAN PETUNJUK TEKNISNYA ADA DI OTORITAS JASA KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DAN BANK INDONESIA ITU SENDIRI.



FOTO: GAL/PDT

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung, Selasa (18/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua BURT Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Achmad Dimiyati Natakusumah,

hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Anggaran DPR RI Semester I Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Raker tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja Setjen sepanjang Semester I Tahun 2023 dan rencana ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Dimiyati mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung bagi DPR RI sebab telah banyak membantu dan mendukung kinerja DPR RI.

"Saya mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI yang telah banyak mendukung kinerja DPR RI. Saya sangat mengetahui hal tersebut, pertama dari pengelolaan anggaran, kedua penataan anggaran, ketiga pencatatan, dan keempat bagaimana melayani kinerja pimpinan maupun anggota DPR," papar Dimiyati, dalam Raker Monitoring dan Evaluasi Anggaran DPR RI Semester I Tahun 2023, di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (18/8).

”

**SAYA
MENGAPRESIASI
KINERJA SETJEN
DPR RI YANG
TELAH BANYAK
MENDUKUNG
KINERJA DPR RI.**



FOTO: ICA/PDT

Wakil Ketua BURT, Achmad Dimiyati Natakusumah saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Anggaran DPR RI Semester I Tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (18/8/2023).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I tersebut juga mengatakan bahwa BURT DPR RI bersama Setjen DPR RI terus melakukan evaluasi kinerja Setjen DPR RI secara berkala, yakni tiap semester. Dimiyati menjelaskan, bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan dari sektor kinerja, namun dari sektor personil atau Sumber Daya Manusia (SDM), beserta hasil atau *output* dan *outcome* dari kinerja yang dilakukan.

"Ke depan, saya minta sudah mengarah ke modernisasi dan digitalisasi. Jadi, program-program yang tidak ada *output*, *outcome*, dan kurang memiliki benefit

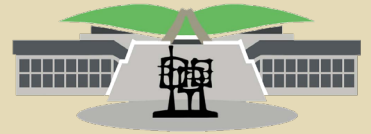
terhadap lembaga, dalam arti tidak ada bentuknya, di-*drop* atau dikurangi, jangan terlalu banyak. Sebab apabila terlalu banyak, nanti tidak ada monumental dan bentuknya," tandas Politisi Fraksi PKS ini.

Dimiyati menilai kinerja DPR RI secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun, Dimiyati menyampaikan perlunya evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi apabila ada sistem-sistem baru yang terkait dengan kinerja Setjen DPR RI. "Peran BURT, akan terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap hal tersebut," tutup Dimiyati.

[ica/rdn](https://www.ica.rdn.go.id)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





KETUA BURT DPR RI AGUNG BUDI SANTOSO SAAT BERTUKAR CENDERAMATA USAI MENGELAK PERTEMUAN DENGAN DIREKSI RS MITRA KELUARGA WARU DI SIDOARJO, JAWA TIMUR, SELASA (9/8/2023). FOTO: MH/PDT



ANGGOTA KOMISI V DPR RI IRWAN SAAT KOMISI V DPR RI MENGUNJUNGI KAMPUNG SELAMBAI, BONTANG, KALIMANTAN TIMUR, SELASA (8/8/2023). FOTO: WE/PDT



WAKIL KETUA BKSAP DPR RI PUTU SUPADMA RUDANA SAAT MEMIMPIN KUNJUNGAN KERJA BKSAP DPR RI KE MUSEUM SBY-ANI DI PACITAN, JAWA TIMUR, JUMAT (18/08/2023). FOTO: GAL/PDT